



EFEKTIVITAS PROGRAM KELUARGA BERENCANA (KB) PADA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA DALAM MENINGKATKAN KEPEDULIAN MASYARAKAT MENGGUNAKAN ALAT KONTRASEPSI DI KABUPATEN REMBANG

Ninda Apriani Amadita^{1*}, Ari Subowo¹, Nina Widowati¹

¹ Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia.

*Corresponding author: nindaaprianiamadita@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received :
Revised :
Accepted :
Published :

Keywords:

*Effectiveness, Program
Effectiveness, Family
Planning Program,
Contraceptives.*

ABSTRACT

This research addresses Indonesia's complex population dynamics, such as high growth rates, uneven distribution, young age structure, and suboptimal quality, which hinder economic and social development. To tackle these issues, the government launched the Family Planning (KB) program in 1970, promoting contraceptive use, marriage postponement, and family resilience. The study evaluates the program's effectiveness in Rembang Regency, using a descriptive qualitative method with surveys, interviews, and direct observations. Findings indicate increased community awareness but highlight challenges such as service access, social stigma, and traditional beliefs. Supporting factors include strong organizational collaboration and positive community relations. However, obstacles include limited outreach, infrastructure gaps, and insufficient community leader support.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Istilah penduduk merujuk pada individu yang menetapkan domisili di wilayah tertentu selama minimal enam bulan, termasuk mereka yang telah tinggal kurang dari enam bulan namun berniat menetap. Sebagai negara berkembang, Indonesia menghadapi tantangan besar terkait dinamika kependudukan yang ditandai dengan laju

pertumbuhan tinggi, distribusi penduduk tidak merata, struktur usia muda, dan kualitas penduduk yang kurang optimal. Permasalahan ini menghambat masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan, sehingga menjadi beban kolektif. Pertumbuhan penduduk yang pesat memperumit upaya pemerataan

Program Keluarga Berencana (KB) di Indonesia dimulai pada 1970 untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk. Pemerintah menetapkan regulasi seperti Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pembangunan Keluarga dan Keluarga Berencana, dengan tujuan mendorong penundaan perkawinan, penggunaan alat kontrasepsi, dan penguatan ketahanan keluarga. Penyuluh dan Petugas Lapangan KB bertugas memberikan edukasi dan layanan untuk mendukung kesejahteraan keluarga. Strategi ini tidak hanya mengatur kelahiran tetapi juga meningkatkan kesehatan ibu dan anak, serta mengurangi risiko kematian akibat kehamilan yang tidak direncanakan.

Meskipun cakupan peserta KB aktif di Kabupaten Rembang mencapai 100% sejak 2016, terdapat peningkatan angka unmet need KB dari 6,73% pada 2016 menjadi 10,82% pada 2020. Penurunan angka pemakaian kontrasepsi pada 2020, terutama selama pandemi COVID-19, menunjukkan tantangan dalam menjaga keberlanjutan program KB. Penurunan jumlah peserta KB aktif dari 108.389 pada 2018 menjadi 93.448 pada 2022 mencerminkan perlunya optimalisasi program, baik melalui edukasi masyarakat maupun peningkatan aksesibilitas layanan kesehatan.

Statistik kependudukan di Kabupaten Rembang pada 2021 mencatat 8.419 bayi lahir, dengan 432 kasus bayi berat badan lahir rendah (BBLR) dan 48 kasus gizi buruk. Angka ini menunjukkan masih adanya tantangan dalam kesehatan reproduksi ibu dan bayi. Kurangnya pengawasan kesehatan prakonsepsi dan edukasi tentang gizi ibu hamil menjadi faktor yang memengaruhi kualitas kesehatan bayi yang dilahirkan.

Secara keseluruhan, program KB menjadi langkah penting untuk menekan laju pertumbuhan penduduk dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pendekatan ini memerlukan kolaborasi pemerintah, penyuluh KB, dan masyarakat untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas program. Selain itu, peningkatan kualitas penduduk dan keluarga melalui kebijakan yang holistik diperlukan untuk mencapai keseimbangan

antara jumlah penduduk dan daya dukung lingkungan, serta mewujudkan masyarakat yang sehat dan sejahtera.

A. Kajian Teori

Administrasi Publik

Nicholas Henry (dalam Sugandi, 2011:10-13) menguraikan perkembangan ilmu administrasi publik ke dalam beberapa paradigma berikut:

1. Dikotomi Politik Administrasi Woodrow Wilson dan Frank Goodnow memulai paradigma ini dengan melakukan percobaan pemisahan dikotomi antara politik dan administrasi dalam penerapan ilmu administrasi bisnis. Pemisahan ini perlu dilakukan karena sistem administrasi di Amerika masih menganut sistem spoils dan patronase.
2. Prinsip-Prinsip Administrasi Pakar administrasi Willoughby's menawarkan administrasi sebagai prinsip yang tidak dapat dibaurkan dengan hal-hal lain. Sebab, Administrasi Publik bukan sesuatu yang bernilai bebas, tetapi sarat akan nilai administratif daripada nilai politik.
3. Administrasi Publik sebagai Ilmu Politik Muncul kajian-kajian administrasi publik yang sangat kuat terhadap aspek politik.
4. Administrasi Publik sebagai Organisasi Dikemukakan konsep-konsep lama yang berkaitan dengan ilmu manajemen, seperti pengembangan organisasi, teori organisasi dan perilaku, teknik manajemen kepemimpinan, penganggaran, pemasaran, auditing dan lain lain.
5. Administrasi Publik sebagai Administrasi Publik Paradigma terakhir menekankan pada ilmu administrasi publik sebagai ilmu administrasi publik yang telah masuk berbagai konsep pada ilmu ini.

Manajemen Publik

George R Terry dan Leslie W Rue (2014:9-10) mengungkapkan adanya fungsi-fungsi manajemen yang menjadi pedoman untuk melaksanakan kegiatan tertentu, antara lain:

1. Perencanaan, dilakukan untuk menentukan tujuan yang hendak dicapai organisasi serta

segala sesuatu yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut.

2. Pengorganisasian, kegiatan mengelompokkan, menentukan, dan menempatkan sumber daya supaya kegiatan-kegiatan tersebut dapat terlaksana.
3. Penggerakan, langkah untuk mengarahkan dan menyalurkan berbagai hal dalam upaya melaksanakan kegiatan ke arah tujuan yang ditetapkan.
4. Pengawasan, mengukur upaya pelaksanaan kegiatan telah sesuai dengan tujuan yang disepakati.

Efektivitas Program

Menurut Georgopolous dan Tannembaum (dalam Winasis & Setyawan, 2016:13) mendeskripsikan efektivitas yang dilihat dalam sudut pandang pencapaian sasaran. Dimana suatu organisasi, selain mempertimbangkan apa saja sasaran yang ditetapkan, juga harus mampu mempertahankan diri dalam mencapai sasaran tersebut.

Menurut Jibril (2017:3), efektivitas berfokus kepada hasil (outcome) sebuah program atau kegiatan, pelaksanaan program kegiatan dianggap efektif jika output kegiatan tersebut mampu memenuhi tujuan yang diharapkan.

Sutrisno (2007) yang mengemukakan bahwa efektivitas program dapat dilihat melalui beberapa ukuran sebagai berikut:

1. Pemahaman program
2. Ketepatan sasaran
3. Ketepatan waktu
4. Tercapainya tujuan
5. Perubahan nyata

Adapun faktor pendorong dan faktor penghambat efektivitas program dapat dilihat dari keempat aspek menurut Richard M. Steers (1985), diantaranya:

1. Karakteristik organisasi
2. Karakteristik lingkungan
3. Karakteristik pekerja
4. Karakteristik kebijakan & praktik manajemen.

Keluarga Berencana

Pengertian Program Keluarga Berencana (KB) menurut regulasi di Indonesia dijelaskan

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana. Dalam peraturan ini, Program Keluarga Berencana didefinisikan sebagai:

"Upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran anak, pembinaan ketahanan keluarga, serta peningkatan kesejahteraan keluarga untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas."

Program ini bertujuan untuk:

1. Pendewasaan Usia Perkawinan: Mengatur usia minimal perkawinan untuk mengurangi risiko kesehatan reproduksi dan mendukung kesiapan mental serta ekonomi pasangan.
2. Pengaturan Kelahiran Anak: Membantu keluarga merencanakan jumlah dan jarak kelahiran anak melalui penggunaan alat kontrasepsi yang sesuai.
3. Pembinaan Ketahanan Keluarga: Memberikan dukungan dalam membangun keluarga yang tangguh secara sosial, ekonomi, dan emosional.
4. Peningkatan Kesejahteraan Keluarga: Memastikan keluarga dapat memenuhi kebutuhan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, guna meningkatkan kualitas hidup.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang tersebut, masalah yang dapat dirumuskan mencakup bagaimana efektivitas program Keluarga Berencana (KB) yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Rembang dalam meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap penggunaan alat kontrasepsi di Kabupaten Rembang, serta apa saja faktor pendukung dan penghambat yang memengaruhi keberhasilan program tersebut dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pengaturan kelahiran demi kesejahteraan keluarga.

C. METODE

Dalam penelitian berjudul *Efektivitas Program Keluarga Berencana (KB) pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dalam Peningkatan Kepedulian Masyarakat Menggunakan Alat Kontrasepsi di Kabupaten Rembang*, digunakan metode penelitian kualitatif deskriptif untuk menggambarkan fenomena yang kompleks, dinamis, holistik, dan penuh makna. Lokasi penelitian berada di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rembang, dengan subjek penelitian terdiri atas Sub-bagian Pelayanan Keluarga Berencana, penyuluh KB, dan peserta KB yang dipilih secara *purposive*. Penelitian menggunakan data primer dari wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, serta data sekunder dari dokumen dan literatur terkait. Pengumpulan data melibatkan teknik triangulasi, yakni triangulasi teknis, waktu, dan sumber untuk menjamin validitas data. Data dianalisis melalui reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan menggunakan pendekatan Miles dan Huberman, memastikan keandalan dan validitas hasil penelitian.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Efektivitas Program KB dalam Meningkatkan Kepedulian Masyarakat Menggunakan Alat Kontrasepsi di Kabupaten Rembang

a. Pemahaman Program

Alat kontrasepsi adalah metode yang digunakan untuk mengatur kehamilan dan meningkatkan kualitas hidup keluarga melalui perencanaan yang baik. Program Keluarga Berencana (KB) bertujuan membantu masyarakat dalam merencanakan jumlah dan jarak kelahiran anak, yang berdampak pada peningkatan kesehatan ibu dan anak, kesejahteraan ekonomi, dan pemberdayaan perempuan. Dinsos PPKB Rembang, sebagai pelaksana program, melakukan sosialisasi intensif kepada masyarakat melalui pelatihan dan penyuluhan untuk meningkatkan pemahaman mengenai alat kontrasepsi dan manfaatnya. Upaya ini juga

diarahkan untuk menurunkan angka stunting dan mengendalikan pertumbuhan penduduk melalui penerapan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) yang efektif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa program KB di Kabupaten Rembang berhasil meningkatkan pemahaman masyarakat tentang alat kontrasepsi, terlihat dari data tingkat pemahaman yang naik dari 79,58% pada 2019 menjadi 80,68% pada 2023. Beberapa kecamatan, seperti Pancur dan Sulang, mencatat peningkatan signifikan, menunjukkan keberhasilan program sosialisasi. Meski demikian, beberapa wilayah, seperti Kaliori dan Lasem, mengalami penurunan, menunjukkan perlunya perhatian lebih untuk pemerataan informasi dan dukungan masyarakat. Secara keseluruhan, keberhasilan program ini sejalan dengan teori efektivitas yang menekankan pentingnya pemahaman semua pihak terhadap tujuan program, yang berkontribusi pada perencanaan keluarga yang lebih baik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

b. Ketepatan Sasaran

Dinsos PPKB Rembang menetapkan sasaran program berdasarkan berbagai faktor, seperti usia reproduktif, kesiapan mental, fisik, dan finansial untuk membentuk keluarga yang sehat. Misalnya, remaja menjadi sasaran karena penting untuk memberikan edukasi tentang risiko kehamilan dini dan pentingnya perencanaan keluarga yang matang. Calon pengantin juga menjadi sasaran penting agar mereka memiliki pengetahuan yang cukup tentang alat kontrasepsi sebelum menikah.

Program ini, meskipun sudah tepat sasaran, masih menghadapi beberapa tantangan, seperti rendahnya partisipasi pria dalam

menggunakan kontrasepsi jangka panjang dan penurunan jumlah peserta aktif di beberapa kecamatan. Hal ini mungkin disebabkan oleh kurangnya regenerasi peserta KB atau berkurangnya sosialisasi di beberapa tahun tertentu. Namun, beberapa kecamatan menunjukkan hasil positif, seperti Sarang yang stabil dan Sedan yang mengalami peningkatan pada 2023.

Selain itu, meskipun target penggunaan alat kontrasepsi jangka panjang (MKJP) belum sepenuhnya tercapai, ada kemajuan yang signifikan, seperti peningkatan penggunaan MKJP yang tercatat pada 2023. Untuk memastikan keberhasilan program, Dinsos PPKB Rembang melakukan monitoring dan evaluasi berkala, termasuk analisis pencapaian target dan survei kepuasan masyarakat, serta memberikan pembinaan berkelanjutan kepada peserta KB.

Secara keseluruhan, meskipun ada tantangan, program KB di Rembang dapat dianggap efektif dan sesuai dengan ketepatan sasaran yang telah ditetapkan. Pembinaan yang dilakukan secara berkelanjutan dan upaya evaluasi terus-menerus memastikan bahwa program ini dapat berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan. Ketepatan sasaran menjadi faktor penting yang mendukung keberhasilan program, yang sesuai dengan teori keberhasilan program yang diajukan oleh Sutrisno (2007).

c. Ketepatan Waktu

Ketepatan waktu merupakan aspek krusial dalam efektivitas program Keluarga Berencana (KB), sesuai teori Sutrisno (2007) yang menyatakan bahwa program dianggap efektif jika dilaksanakan tepat waktu dan mampu menyesuaikan kondisi yang ada.

Dalam penelitian ini, pelaksanaan program KB di Kabupaten Rembang mengalami kendala akibat pandemi COVID-19. Dampaknya adalah penundaan penyuluhan lapangan dan pembatalan kegiatan seperti peringatan hari kontrasepsi sedunia, yang menyebabkan target program tidak tercapai sesuai waktu yang ditentukan. Refocusing anggaran dan pembatasan sosial turut memperparah situasi ini, meskipun upaya perbaikan dilakukan melalui kegiatan online dan penjadwalan ulang.

Kendala juga dirasakan oleh peserta program yang menyebutkan ketidaksesuaian jadwal kegiatan dengan waktu luang mereka, serta adanya keterlambatan distribusi alat kontrasepsi. Fleksibilitas jadwal menjadi salah satu tuntutan utama agar pelayanan KB lebih efektif. Petugas lapangan telah berupaya keras menyesuaikan waktu kegiatan, bahkan melibatkan diri di luar jam kerja. Namun, tekanan dalam pelaksanaan ini menunjukkan pentingnya penjadwalan dan koordinasi yang lebih optimal.

Untuk mengatasi hambatan tersebut, DINSOS PPKB Rembang melakukan pemantauan dan evaluasi rutin, serta mengintegrasikan pendekatan fleksibel dalam penyusunan jadwal. Namun, efektivitas program belum sepenuhnya tercapai, karena adanya penundaan signifikan dan ketidaksesuaian dengan kebutuhan peserta. Agar program KB berjalan efektif, diperlukan perbaikan dalam perencanaan waktu, peningkatan koordinasi antar pihak, dan penguatan fleksibilitas untuk menghadapi situasi tak terduga. Dengan demikian, program KB diharapkan mampu mencapai targetnya tepat waktu dan

memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

d. Tercapainya Tujuan

Teks ini memberikan pemaparan yang mendetail tentang berbagai upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (Dinsos PPKB) Kabupaten Rembang dalam merealisasikan program Keluarga Berencana (KB). Upaya ini melibatkan kegiatan sosialisasi, pelayanan KB gratis, penyediaan informasi kontrasepsi, hingga pemanfaatan media sosial. Data wawancara dari berbagai pihak seperti kepala sub-bagian KB KS, koordinator penyuluh, hingga pendapat peserta KB memberikan gambaran nyata mengenai implementasi program tersebut.

Secara garis besar, langkah-langkah strategis yang diambil meliputi:

- 1) **Sosialisasi dan Edukasi:** Dilakukan melalui pertemuan langsung, media massa, media sosial, dan kegiatan komunitas.
- 2) **Pelayanan KB Gratis:** Seperti yang dilakukan pada peringatan hari alat kontrasepsi sedunia, kegiatan ini melibatkan ribuan akseptor.
- 3) **Penyediaan Infrastruktur:** Termasuk penambahan mobil layanan untuk mempermudah akses masyarakat dari wilayah yang jauh.
- 4) **Evaluasi Berkelanjutan:** Dilakukan untuk memastikan efektivitas dan kesesuaian program dengan kebutuhan masyarakat.

Keberhasilan dari program ini juga didukung oleh

pendekatan yang berbasis budaya lokal, kolaborasi dengan tokoh masyarakat, serta pembentukan kelompok kegiatan seperti BKB, BKR, BKL, dan PIKR yang menasar berbagai lapisan masyarakat, mulai dari balita hingga lansia.

Upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas layanan KB melalui berbagai pendekatan yang inovatif ini tampaknya telah membuahkan hasil yang menggembirakan, sesuai dengan prinsip efektivitas program yang menilai keberhasilan berdasarkan pencapaian tujuan. Program ini tidak hanya memberikan akses yang lebih luas terhadap kontrasepsi, tetapi juga membangun kesadaran yang lebih baik tentang pentingnya perencanaan keluarga bagi kesejahteraan masyarakat.

e. Perubahan Nyata

Program Keluarga Berencana (KB) di Kabupaten Rembang, yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (Dinsos PPKB), telah membawa perubahan nyata di masyarakat. Hal ini sesuai dengan teori perubahan nyata yang dikemukakan oleh Sutrisno (2007), di mana keberhasilan suatu program dapat diukur dari dampak positifnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai pihak, program KB ini meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perencanaan keluarga dan penggunaan alat kontrasepsi. Kepala Sub-Bagian KB KS menjelaskan bahwa sejak program ini dilaksanakan, masyarakat menjadi lebih terbuka dalam

merencanakan keluarga. Hal ini terlihat dari bertambahnya peserta KB dan berkurangnya angka kelahiran. Penyuluh KB dan peserta program juga mengakui manfaat kontrasepsi, baik dari segi kesehatan maupun kesejahteraan ekonomi keluarga.

Data evaluasi tahunan Dinsos PPKB menunjukkan hasil yang signifikan. Pada tahun 2023, jumlah bayi lahir dan kasus berat badan lahir rendah (BBLR) mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Beberapa kecamatan, seperti Gunem dan Kaliori, mencatat penurunan signifikan dalam jumlah bayi lahir dan kasus BBLR, yang mengindikasikan keberhasilan program KB dalam mengendalikan kelahiran dan meningkatkan kesehatan ibu hamil. Namun, program ini masih menghadapi tantangan, seperti tingginya kasus gizi buruk di beberapa wilayah, khususnya di Kecamatan Kragan dan Lasem.

Keberhasilan program ini juga didukung oleh strategi pendekatan langsung ke masyarakat. Sosialisasi rutin, penyuluhan oleh kader, serta kerja sama dengan tokoh masyarakat menjadi kunci dalam membangun kesadaran kolektif. Selain itu, masyarakat diberikan pilihan berbagai metode kontrasepsi, baik jangka pendek maupun panjang, sesuai kebutuhan mereka. Kebebasan memilih ini memungkinkan masyarakat untuk merencanakan keluarga secara optimal. Edukasi yang dilakukan melalui berbagai media dan kegiatan juga memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat tentang manfaat kontrasepsi dan pentingnya menjaga jarak kelahiran.

Secara keseluruhan, program KB di Kabupaten Rembang berhasil membawa perubahan positif yang nyata dalam masyarakat. Program ini tidak hanya meningkatkan kesadaran dan sikap masyarakat terhadap perencanaan keluarga, tetapi juga memberikan dampak jangka panjang bagi kesejahteraan keluarga dan kesehatan masyarakat. Dengan hasil tersebut, program KB ini sejalan dengan teori perubahan nyata, yang menunjukkan efektivitasnya dalam mencapai tujuan yang diharapkan.

2. Faktor Pendorong dan Penghambat Efektivitas Program Keluarga Berencana DINSOS PPKB Rembang dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat melalui penggunaan alat kontrasepsi di Kabupaten Rembang

a. Karakteristik Organisasi

Karakteristik organisasi, seperti yang dikemukakan Richard M. Steers (1985), mencakup struktur dan teknologi yang berperan penting dalam efektivitas program. Struktur organisasi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (DINSOS PPKB) Kabupaten Rembang telah dirancang dengan pembagian tugas yang sesuai dengan keahlian masing-masing pegawai. Hal ini tercermin dari penyuluhan KB yang dilakukan oleh pegawai dengan latar belakang kesehatan serta pengelolaan administratif yang ditangani oleh staf dengan kompetensi di bidang tersebut. Proses evaluasi kompetensi secara berkala dan komunikasi yang baik antara atasan dan pegawai turut memastikan bahwa tugas yang diberikan telah sesuai dengan kemampuan individu. Dengan demikian, struktur organisasi yang diterapkan DINSOS PPKB mendukung efektivitas program KB secara optimal.

Namun, meskipun struktur organisasi sudah efektif dalam banyak aspek, terdapat kendala dalam implementasi di lapangan.

Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan sumber daya manusia, terutama jumlah Petugas Lini Lapangan KB (PLKB) yang tidak sebanding dengan luas wilayah. Di Kecamatan Rembang, misalnya, hanya terdapat empat penyuluh KB untuk menjangkau 34 desa, sehingga penyuluhan dan dukungan program KB tidak merata di semua wilayah. Selain itu, peran organisasi masyarakat dan mitra kerja dalam mendukung program KB dinilai belum optimal. Kendala ini mengakibatkan distribusi perhatian dan dukungan terhadap program KB menjadi kurang maksimal, terutama di desa-desa yang lebih terpencil.

DINSOS PPKB juga telah mengadopsi teknologi dan proses operasional untuk meningkatkan efektivitas program, seperti perencanaan yang matang, evaluasi kinerja secara berkala, dan penyusunan strategi berbasis visi dan misi organisasi. Evaluasi kinerja yang dilakukan memberikan wawasan mendalam mengenai kekuatan dan kelemahan program KB. Dalam evaluasi tersebut, ditemukan bahwa pembagian tugas yang berbasis keahlian telah berhasil meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas. Namun, kendala seperti kurangnya SDM di lapangan dan belum optimalnya kolaborasi dengan mitra kerja menunjukkan adanya kebutuhan untuk penyesuaian strategi.

Untuk mengatasi tantangan ini, DINSOS PPKB perlu menambah jumlah SDM, khususnya penyuluh KB, dan meningkatkan kerjasama dengan organisasi masyarakat serta mitra kerja. Langkah-langkah ini dapat membantu distribusi program KB secara merata ke seluruh wilayah. Selain itu, evaluasi kinerja yang berkelanjutan dan umpan balik dari masyarakat harus dimanfaatkan untuk memperbaiki strategi pelaksanaan program. Dengan memperkuat struktur dan teknologi organisasi, DINSOS PPKB dapat mencapai tujuan jangka panjangnya dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap

program KB, serta menciptakan keluarga yang lebih sehat dan sejahtera.

b. Karakteristik Pekerja

Menurut Richard M. Steers (1985), keberhasilan organisasi sangat bergantung pada pengelolaan sumber daya manusia, termasuk menyelaraskan tujuan individu dan organisasi. Dalam konteks Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (DINSOS PPKB) Rembang, sikap profesional, komitmen, dan motivasi para pegawai menjadi elemen penting dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi. Pegawai yang sadar akan perbedaan karakter individu tetapi tetap mampu bekerja secara sinergis berkontribusi signifikan terhadap efektivitas organisasi.

Sikap profesional pegawai tercermin dalam interaksi dengan masyarakat. Pendapat dari peserta program Keluarga Berencana (KB) menggarisbawahi keramahan dan perhatian pegawai dalam memberikan pelayanan. Penjelasan yang jelas, kesediaan membantu, serta upaya aktif pegawai dalam menyediakan informasi menegaskan sikap profesional yang tidak hanya meningkatkan kualitas layanan tetapi juga membangun citra positif organisasi. Hal ini mendukung teori Steers yang menyatakan bahwa individu yang menyelaraskan tujuan pribadinya dengan organisasi akan lebih efektif dalam bekerja.

Komitmen para pegawai di DINSOS PPKB Rembang juga sangat terlihat. Dedikasi dalam memberikan pelayanan terbaik, partisipasi aktif dalam kegiatan penyuluhan, serta kehadiran tepat waktu menunjukkan tingkat tanggung jawab yang tinggi. Evaluasi kinerja yang dilakukan secara rutin, penandatanganan Pakta Integritas, dan perjanjian kinerja menjadi mekanisme formal yang memastikan komitmen pegawai untuk bekerja dengan integritas dan akuntabilitas. Hal ini mendukung keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan program KB.

Motivasi yang diberikan oleh pemimpin, seperti arahan dan contoh disiplin dari

Kepala DINSOS, juga menjadi faktor kunci. Pemimpin yang memotivasi pegawai tidak hanya dengan kata-kata, tetapi juga dengan tindakan nyata, menciptakan budaya kerja yang disiplin dan penuh semangat. Motivasi ini selaras dengan teori Steers, yang menekankan pentingnya peran pemimpin dalam mendorong individu untuk bekerja lebih baik demi tujuan organisasi.

Secara keseluruhan, sikap, komitmen, dan motivasi pegawai di DINSOS PPKB Rembang telah menciptakan sinergi yang kuat antara tujuan individu dan organisasi. Dengan mekanisme evaluasi kinerja, penerapan Pakta Integritas, dan motivasi kepemimpinan, DINSOS PPKB mampu mencapai efektivitas yang tinggi dalam melaksanakan program KB. Keselarasan ini menjadi kunci keberhasilan organisasi dalam melayani masyarakat secara profesional dan berdedikasi.

c. Karakteristik Lingkungan

Persepsi masyarakat yang dipengaruhi oleh mitos dan disinformasi, seperti anggapan bahwa program Keluarga Berencana (KB) dapat menyebabkan mandul atau berbahaya bagi kesehatan, menjadi tantangan besar dalam implementasi program ini. Mitos-mitos semacam ini sering kali menghambat keberhasilan program KB dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadapnya. Untuk mengatasi hal ini, DINSOS PPKB Rembang telah mengambil langkah-langkah strategis, salah satunya dengan memberikan edukasi yang lebih intensif. Sebagai tambahan, melibatkan tokoh masyarakat atau agama juga dianggap penting dalam meningkatkan kepercayaan terhadap program KB. Pendekatan ini diharapkan dapat mengurangi stigma dan disinformasi yang berkembang di masyarakat.

Selain itu, untuk mengatasi kendala yang ada, DINSOS PPKB Rembang juga fokus pada peningkatan kapasitas penyuluh dan kader melalui pelatihan rutin. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa para penyuluh memiliki pengetahuan yang cukup untuk memberikan informasi yang

akurat dan terpercaya kepada masyarakat. Koordinasi antara Dinas Kesehatan, BKKBN, dan pemerintah desa juga diperkuat agar tercipta sinergi antara berbagai pihak yang dapat mendukung kelancaran program KB. Upaya ini tidak hanya mengatasi masalah komunikasi, tetapi juga mendukung kelancaran distribusi layanan KB di berbagai wilayah.

Terkait dengan kendala geografis dan akses, DINSOS PPKB juga berusaha mengadakan layanan keliling atau bekerja sama dengan puskesmas setempat untuk memperluas jangkauan program KB, terutama di daerah terpencil. Ini merupakan langkah penting agar masyarakat di daerah yang lebih sulit dijangkau tetap memperoleh informasi dan layanan terkait program KB. Pendekatan ini memperlihatkan bagaimana DINSOS PPKB berusaha mengatasi masalah yang timbul dari kendala fisik maupun sosial dengan cara yang inklusif dan adaptif. Sementara itu, komunikasi internal yang efektif antara tingkatan dan divisi di DINSOS PPKB Rembang menjadi faktor kunci dalam keberhasilan program KB. Menurut Bapak Yasto, Kepala Sub-Bagian KB KS, komunikasi yang jelas dan saluran informasi yang terbuka antara setiap pihak sangat diperlukan untuk menyampaikan kebijakan atau strategi program. Komunikasi ini tidak hanya terbatas pada laporan formal, tetapi juga dilakukan melalui pertemuan rutin, baik daring maupun tatap muka, yang memungkinkan setiap divisi berbagi informasi terkait progres dan kendala yang ada di lapangan.

Keberhasilan komunikasi internal ini juga berperan dalam meningkatkan efektivitas program KB di lapangan. Setiap perubahan kebijakan atau update terkait data statistik langsung diteruskan kepada penyuluh, sehingga mereka dapat memberikan penjelasan yang akurat kepada masyarakat. Hal ini memperlihatkan bagaimana komunikasi yang efektif di dalam organisasi dapat mempengaruhi pengelolaan program di lapangan dan meningkatkan pemahaman masyarakat

tentang program KB. Komunikasi yang terbuka antara penyuluh dan koordinator juga memungkinkan pemecahan masalah yang cepat jika terjadi kendala di lapangan, sehingga program KB dapat terus berjalan dengan lancar.

Secara keseluruhan, keberhasilan program KB di Kabupaten Rembang bergantung pada sinergi antara faktor internal dan eksternal. DINSOS PPKB telah mengambil langkah-langkah strategis untuk mengatasi berbagai kendala, baik yang berkaitan dengan mitos, disinformasi, maupun kendala geografis. Dengan meningkatkan kapasitas penyuluh, memperkuat koordinasi antar instansi, serta menjaga komunikasi yang terbuka dan efektif, diharapkan program KB dapat diterima dengan lebih baik oleh masyarakat, lebih efektif, dan berdampak positif bagi kesejahteraan keluarga di Kabupaten Rembang.

d. Karakteristik Kebijakan dan Sistem Manajemen

Berdasarkan wawancara dengan berbagai pihak di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (DINSOS PPKB) Kabupaten Rembang, dapat disimpulkan bahwa kebijakan dan praktik manajemen memainkan peran penting dalam pelaksanaan Program Keluarga Berencana (KB). Mengacu pada teori Richard M. Steers (1985), manajemen merupakan serangkaian prosedur yang diatur untuk mengelola urusan organisasi secara efektif. Dalam konteks DINSOS PPKB, para pemimpin dan staf menyadari pentingnya kebijakan yang jelas sebagai panduan dalam menentukan strategi pelaksanaan program.

Kebijakan yang ditetapkan oleh DINSOS PPKB Rembang berfungsi sebagai acuan

dalam pengembangan program. Bapak Yasto, Kepala Sub-bagian KB KS, menegaskan bahwa kebijakan berpengaruh besar terhadap langkah-langkah yang diambil dalam program KB, baik yang berfokus pada edukasi maupun penguatan akses layanan kesehatan. Pernyataan Ibu Sulis dan Ibu Winda juga mencerminkan bahwa kebijakan ini memberikan arahan yang jelas dalam penyuluhan dan sosialisasi, yang pada gilirannya berkontribusi pada peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya program KB.

Namun, wawancara juga mengungkapkan adanya kendala dalam implementasi kebijakan tersebut. Beberapa narasumber mengidentifikasi kurangnya sosialisasi yang merata sebagai salah satu tantangan. Ibu Cantika dan Ibu Novita menyebutkan bahwa banyak masyarakat yang belum memahami program KB dan manfaatnya, yang dapat mengurangi partisipasi. Selain itu, terdapat kendala dalam manajemen, seperti koordinasi antara petugas dan kurangnya sumber daya manusia yang terlatih, yang menghambat efektivitas pelaksanaan program.

Dalam menghadapi kendala tersebut, DINSOS PPKB Rembang mengadopsi pendekatan manajerial yang responsif. Menurut Bapak Yasto dan Ibu Purwanti, evaluasi rutin dan pengumpulan umpan balik dari masyarakat menjadi bagian dari strategi untuk mengidentifikasi masalah dan mencari solusi. Melalui evaluasi ini, mereka dapat melakukan penyesuaian kebijakan yang diperlukan untuk menanggapi kebutuhan masyarakat dan kondisi lokal. Hal ini menunjukkan bahwa manajemen yang baik harus bersifat fleksibel dan adaptif terhadap perubahan yang terjadi di lapangan.

penggunaan alat kontrasepsi, meskipun ada beberapa tantangan. Keberhasilan program tercermin dalam peningkatan pemahaman masyarakat tentang metode kontrasepsi dan manfaatnya, serta penggunaan kontrasepsi jangka panjang yang terus meningkat, meskipun

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, program Keluarga Berencana (KB) di Kabupaten Rembang dapat dianggap cukup efektif dalam meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap

belum sepenuhnya memenuhi target. Program ini didukung oleh kebijakan yang jelas, penyuluhan intensif, dan pemanfaatan media sosial, serta pelatihan untuk petugas dan penyuluh. Namun, tantangan seperti kurangnya sosialisasi merata, ketidakcocokan waktu pelaksanaan dengan kebutuhan masyarakat, serta keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia masih menjadi hambatan. Faktor-faktor pendorong seperti koordinasi yang baik, karakteristik pekerja yang berdedikasi, dan kebijakan yang responsif berkontribusi pada efektivitas, sementara penghambat seperti mitos yang berkembang di masyarakat dan keterbatasan infrastruktur mengurangi dampak yang diinginkan. Evaluasi rutin dan pendekatan berbasis kesadaran menjadi kunci dalam memastikan keberhasilan program.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai efektivitas Program KB di Dinsos PPKB Kabupaten Rembang, beberapa saran yang dapat diberikan untuk meningkatkan efektivitas program ke depan antara lain: pertama, untuk mengatasi keterbatasan jumlah penyuluh, Dinsos PPKB perlu memperkuat tim penyuluh dengan menambah jumlah tenaga penyuluh atau melibatkan kader desa yang dilatih lebih intensif, sehingga program dapat menjangkau seluruh wilayah, termasuk daerah terpencil. Kedua, pelatihan rutin untuk penyuluh harus dilakukan secara berkala, mencakup informasi kontrasepsi, keterampilan komunikasi persuasif, serta cara mengatasi stigma dan mitos yang ada di masyarakat. Ketiga, mengingat tingginya penggunaan media sosial, Dinsos PPKB dapat memanfaatkan platform digital seperti Instagram, Facebook, atau bahkan membuat aplikasi atau website untuk menyampaikan informasi mengenai KB melalui video tutorial, webinar, dan infografis. Keempat, penting untuk melibatkan tokoh masyarakat dan agama dalam penyuluhan untuk mengatasi stigma seputar kontrasepsi, karena pendekatan berbasis kepercayaan lokal akan lebih diterima oleh masyarakat. Kelima, akses masyarakat terhadap layanan KB perlu ditingkatkan, terutama di daerah terpencil, dengan memperkuat layanan KB keliling, memperbaiki pos pelayanan KB,

serta memastikan fasilitas kesehatan desa memiliki tenaga medis dan fasilitas yang memadai. Keenam, untuk memperbaiki koordinasi, Dinsos PPKB perlu memperkuat kerja sama dengan instansi terkait, seperti Dinas Kesehatan, BKKBN, dan pemerintah desa, untuk memastikan program KB terintegrasi dan sinergis. Terakhir, sosialisasi yang lebih personal dan berbasis konteks lokal harus dilakukan untuk mengurangi mitos dan ketidakpahaman mengenai KB, dengan kampanye yang melibatkan masyarakat dalam berbagi pengalaman positif tentang penggunaan kontrasepsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, Milna. Dkk. Efektivitas Program Konseling Remaja Di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Manado. *Jurnal Administrasi Publik*. Vol. 6 No. 94 (2020) <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/JAP/article/view/297>
- Ashford, H. (2020). Population Control, Development, and Ghana's National Family Planning Programme, 1960-1972. *The Historical Journal*, 63(2), 469-493.
- Arsyad, Lincoln. *Ekonomi pembangunan Lincoln Arsyad*. Yogyakarta, STIE YKPN, 1988. *Perpusnas*, <http://kin.perpusnas.go.id/DisplayData.aspx?pId=37490&pRegionCode=JIUNM AL&pClientId=111>. Accessed 11 April 2023.
- Basten, S. G., Cheng, Y., & Han, X. (2019). Assessing the impact of the "one-child policy" in China: A synthetic control approach. *journal's policy and the authors*, 1-17.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Rembang. "Banyaknya Kelahiran Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Rembang, 2015." *Badan Pusat Statistik Kabupaten Rembang*, 25 June 2018, <https://rembangkab.bps.go.id/statictable/2017/07/26/213/banyaknya-kelahiran->

- menurut-jenis-kelamin-di-kabupaten-rembang-2015.html. Accessed 30 March 2023.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Rembang. "Kependudukan." *Kepadatan Penduduk per km (Jiwa), 2019-2021*, BPS Kabupaten Rembang, 24 February 2022, <https://rembangkab.bps.go.id/indicator/12/264/1/kepadatan-penduduk-per-km.html>. Accessed 11 April 2023.
- BPS Kabupaten Rembang. "Jumlah Penduduk (Laki-Laki+Perempuan) Menurut Kecamatan dan Kelompok Umur, 2020-2021." *BPS Kabupaten Rembang*, BPS Kabupaten Rembang, 4 July 2022, <https://rembangkab.bps.go.id/indicator/12/553/1/jumlah-penduduk-laki-laki-perempuan-menurut-kecamatan-dan-kelompok-umur.html>. Accessed 11 April 2023.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi*. Cet. II; Jakarta: Prenada Media Group. 2015.
- BKKBN. (2023, January 30). *Kisah Kader Telponi Stunting di Rembang, Tak Patah Arang Hadapi Penolakan*. Keluarga Indonesia. Retrieved June 6, 2023, from <https://keluargaIndonesia.id/2023/01/30/kisah-kader-telponi-stunting-di-rembang-tak-patah-arang-hadapi-penolakan/>
- BPS Kabupaten Rembang. (2020, May 27). *Badan Pusat Statistik*. Badan Pusat Statistik. Retrieved June 6, 2023, from <https://rembangkab.bps.go.id/statictable/2020/05/27/710/jumlah-pasangan-usia-subur-dan-peserta-kb-aktif-di-kabupaten-rembang-2019.html>
- Cristiana, E. V., Harlen, H., & Widayatsari, A. 2021. Efektivitas Pelaksanaan Program Keluarga Berencana Dalam Pengendalian Jumlah Penduduk Di Provinsi Riau. *PEKBIS*, 13(2), 133-144.
- DRAJAT, Q., 2022. *Efektivitas program Kampung KB Dalam Membentuk Keluarga yang Berkualitas (Studi Kasus Kampung KB Desa Parijatah Wetan Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi)* (Doctoral dissertation, UIN KH Acmad Siddiq Jember).
- Dodson, J., Derer, P., Cafaro, P., & Gotmark, F. (2022). Population growth, family planning and the Paris Agreement: an assessment of the nationally determined contributions (NDCs). *Int Environ Agreements*, 22, 561-576.
- Harahap, Isnaini. *Ekonomi pembangunan: pendekatan transdisipliner*. Perdana Publishing, 2018. *Repository UINSU*, [http://repository.uinsu.ac.id/5797/1/EKO NOMI%20PEMBANGUNAN.pdf](http://repository.uinsu.ac.id/5797/1/EKO%20NOMI%20PEMBANGUNAN.pdf). Accessed 11 April 2023.
- Jatengprov. (2022, November 15). *Stunting di Kabupaten Rembang Sentuh 11,8 Persen*. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Retrieved June 6, 2023, from <https://jatengprov.go.id/beritadaerah/stunting-di-kabupaten-rembang-sentuh-118-persen/>
- Kompas. (2020, August 11). *KB, Salah Satu Usaha Pemerintah untuk Menekan Tingkat Pertumbuhan Penduduk Halaman all*. Kompas.com. Retrieved June 6, 2023, from <https://www.kompas.com/skola/read/2020/08/11/141500569/kb-salah-satu-usaha-pemerintah-untuk-menekan-tingkat-pertumbuhan-penduduk?page=all>
- Marhaeni, AAIN. *Buku Pegangan Pengantar Kependudukan Jilid 1*. Denpasar, CV Sastra Utama, 2018. *erepo unud*, <http://erepo.unud.ac.id/id/eprint/17587/1/d8f160e422e5c4a8c51e259b70b572da.pdf>. Accessed 11 April 2023.
- Muaya, T.M., Sampe, S. and Kumayas, N., 2023. Efektivitas Program Keluarga Berencana Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Dalam Menekan Laju Pertumbuhan Penduduk Di Kabupaten Minahasa. *GOVERNANCE*,

- 3(1).
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/governance/article/view/47446>
- Ndau, Yanuarius David. (2022). Efektivitas Pelayanan Program Keluarga Berencana Oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dalam Mengendalikan Angka Kelahiran Di Kota Kupang (Doctoral dissertation, Institut Pemerintahan Dalam Negeri). <http://eprints.ipdn.ac.id/7687/>
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga Keluarga Berencana Dan Sistem Informasi Keluarga*. Republik Indonesia, 2014. *Peraturan BPK*, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5531> Accessed 11 April 2023.
- Remi, Sutyastie Soemitro dan Ferry Hedyanto., 2018, *Ekonomi Kependudukan: Teori dan Kebijakan*, ALG Unpad, Jawa Barat.
- Republik Indonesia. *Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. Republik Indonesia, 2014. *Peraturan BPK*, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014>. Accessed 10 April 2023.
- Republik Indonesia. *Undang-undang (UU) Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga*. Jakarta, Pemerintah Republik Indonesia, 2009. *Peraturan BPK*, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38852/uu-no-52-tahun-2009>. Accessed 11 April 2023.
- Saifuddin, Abdul Bari., 2006, *Panduan Praktis Pelayanan Kontrasepsi*, Yayasan Bina Pustaka, Jakarta.
- Setyawati, Vilda Ana Veria, and Faizzatun Ramadha. "Pengaruh kampung KB pada intervensi gizi sensitif stunting di Desa Janegara." *Jurnal Gizi Indonesia (The Indonesian Journal of Nutrition)* 9.1 (2020): 42-47.
- Sulistiyawati, Ari., 2011, *Keluarga Berencana*, Salemba Medika, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, and Budi Sulistyowati. *Sosiologi Suatu Pengantar*. 48 ed., Jakarta, Rajawali Pers, 2013. *Perpustakaan Nasional RI*, <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1137651> Accessed 11 April 2023.
- Sugiyono, 2017. *Metode Penelitian Kualitatif. Untuk Penelitian Yang Bersifat: Eksploratif, Enterpretif, Interaktif Dan Harapan Diklaim Efektif Tekan Konstruktif*. Alfabeta. Bandung. https://opac.isi.ac.id/index.php?p=show_detail&id=43363
- Sukirno, Sadono. *Ekonomi Pembangunan:Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan*. Jakarta, Kencana, 2006. *Perpusnas*, <http://kin.perpusnas.go.id/DisplayData.aspx?pId=9584&pRegionCode=UNIAD&pClientId=125>. Accessed 11 April 2023.
- Sukirno, Sadono. *Pengantar Teori Makroekonomi*. Banjarmasin, PT. RajaGrafindo Persada, 2001. *One Search*, <https://onesearch.id/Record/IOS3504.libra-013395116000061?widget=1#details>. Accessed 11 April 2023.